**Ilmu Padi di Bawah Matahari Terbit: Implementasi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pertanian pada Masa Pendudukan Jepang  
(1942-1945)**

Alamsyah1 dan Dwi Mulyatari2

1Alumni Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

2Staf Pengajar Senior pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,

Universitas Indonesia

*E-Mail: rzalamsyah00@gmail.com, dwimulyatari.dm@gmail.com*

**Abstrak**

Ki Hadjar Dewantara adalah salah satu tokoh nasional yang dikenal melalui pemikiran-pemikiran, seperti pemikiran tentang kebudayaan dan pendidikan. Selain itu, ternyata Ki Hadjar Dewantara juga mengembangkan pemikiran tentang pertanian. Pemikiran tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebijakan pertanian pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan tersebut telah menimbulkan konsekuensi terhadap Ki Hadjar Dewantara yang berimbas pada perguruan nasionalnya, yaitu Taman Siswa. Atas konsekuensi tersebut, Ki Hadjar Dewantara beradaptasi dengan cara mengatur siasat melalui implementasi pemikirannya tentang pertanian melalui Taman Siswa, serta memberikan aspirasi dalam lembaga pemerintahan Jepang di *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat). Dalam tahapan metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini akan mengulas pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian, bagaimana implementasinya pada masa pendudukan Jepang, serta dampak seperti apa yang ditimbulkan. Penelitian ini tidak pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu yang membahas mengenai tokoh dan pemikirannya, dengan zaman terkait. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang merupakan adaptasi atas kondisi beliau untuk mempertahankan segala kepentingannya mengenai pendidikan dan kesejahteraan rakyat dalam gerakan berkamuflase di Taman Siswa, serta memanfaatkan partisipasinya di lembaga *Chuo Sangi-In* yang mempengaruhi atas gejala menuju sebuah kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: Ki Hadjar Dewantara; Pemikiran Pertanian; Pendudukan Jepang; Taman Tani.

**‘The Rice Science’ Under the Rising Sun: An Implementation of Ki Hadjar Dewantara Thoughts on Agriculture during the Japanese Occupation (1942-1945)**

**Abstract**

Ki Hadjar Dewantara is a national figure known through thoughts, such as thoughts about culture and education. Other than that, Ki Hadjar Dewantara also developed thoughts about agriculture. This thought was related to the agricultural policy during the Japanese occupation. The policy has consequences for Ki Hajar Dewantara who impacted his national institution, namely Taman Siswa. For this consequences, Ki Hadjar Dewantara adapts by organizing tactics through the implementation of his thoughts on agriculture through Taman Siswa, as well as providing aspirations in the Japanese governmental institution at *Chuo Sangi-In* (Central Advisory Council). In the stages of the historical method which consists of heuristic, critics, interpretation, and historiography, this study will review the extent of Ki Hadjar Dewantara's thoughts about agriculture, how he implemented it during the Japanese occupation, and and what impact it has. This research has never been discussed before by previous researchers who discussed the figure and his thoughts, with related times. Therefore, the results of this study indicate that the implementation of Ki Hadjar Dewantara's thoughts about agriculture during the Japanese occupation was an adaptation of his condition to maintain all his interests regarding education and public welfare in the camouflage movement in Taman Siswa, also utilizing his participation in the *Chuo Sangi-in* institution which influenced for the symptoms towards an Indonesian independence.

*Keywords: Ki Hadjar Dewantara; Agricultural Thought; Japanese Occupation; Taman Tani.*

**Pendahu****luan**

Ki Hadjar Dewantara, atau nama lainnya Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah tokoh nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan “Bapak Pendidikan Nasional”. Lahir di lingkungan bangsawan Puro Pakualaman, tidak membuat Ki Hadjar Dewantara sebagai individu yang tertutup terhadap dunia luar. Pada saat sekolah di STOVIA, Ki Hadjar Dewantara dikenal pandai bergaul bersama teman-temannya yang berasal dari latar belakang suku dan budaya di Nusantara. Atas situasi tersebut, munculah suatu kesadaran dari benak dirinya, yaitu kesadaran nasional atas cita-cita kemerdekaan Indonesia (Tim Penulis Kemdikbud, 2017:187). Aktivitas pergerakan nasional Ki Hadjar Dewantara, telah mengantar dirinya ke dalam pergerakan politik di Partai Hindia (*Indische Partij*), bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Namun dalam pergerakannya, Ki Hadjar Dewantara menemui jalan terjal dari pemerintah kolonial, sehingga membuat dirinya terkena hukuman dengan menjalani masa pengasingan di negeri Belanda. Dalam masa pengasingannya, Ki Hadjar Dewantara melahirkan suatu pandangan yang berpengaruh terhadap pemikiran-pemikirannya. Dari situlah, induk dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara terbentuk, yaitu pemikiran tentang pendidikan dan kebudayaan yang bersifat secara nasional.

Dalam perkembangannya, Ki Hadjar Dewantara juga mengembangkan pemikiran tentang pertanian. Gagasan Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian diawali dari pekerjaannya sebagai kontributor di beberapa redaksi pers, sewaktu diasingkan di negeri Belanda. Pada tahun 1916, Ki Hadjar Dewantara diminta oleh perkumpulan mahasiswa *Indische Vereeniging* untuk menjadi redaktur di majalah *Hindia Poetra*. Ki Hadjar Dewantara merancang *Hindia Poetra* sebagai majalah yang bersifat “mimbar bebas”, yang dimana siapapun boleh menulis apapun (Harry A. Poeze, 2008:102). Kebebasan atas tema tulisan itulah, telah mempengaruhi Ki Hadjar Dewantara dalam sebuah awal momentum beliau terhadap gagasan mengenai pertanian. Hal tersebut juga beliau terapkan dalam menuliskan tema pertanian di beberapa pers di Belanda (Irna Hadi Soewito, 1985:70). Gagasan Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian, kemudian berlanjut di perguruan nasionalnya di Taman Siswa. Pada Taman Siswa sendiri, terdapat majalah yang terbit setiap bulannya, yaitu majalah *Keloearga*, *Wasita*, dan *Poesara*. Dalam salah satu di majalah tersebut, terdapat karya dan karangan tulisan Ki Hadjar Dewantara yang memuat tema di bidang pertanian. Menurut Ki Hadjar Dewantara, wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah agraris yang sangat bergantung pada aktivitas pertanian sebagai pemenuhan bahan pokok sehari-hari (*Wasita*, September 1935:182).

Dalam pemikirannya tersebut, ternyata mempunyai keterkaitan dengan aktivitas beliau dan kebijakan pertanian pada masa pendudukan Jepang. Dalam penguasaannya di Indonesia, kebijakan di bidang pertanian merupakan salah satu prioritas Pemerintah Militer Jepang dalam memenuhi kebutuhan logistik perangnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan itu memunculkan respons-respons dari tokoh dan golongan, khususnya dari Ki Hadjar Dewantara. Respons yang diberikan oleh Ki Hadjar Dewantara, ternyata tidak sejalan dengan konsekuensi yang diterimanya, sehingga berimbas pada perguruan yang dimilikinya, yaitu Taman Siswa. Atas konsekuensi tersebut, Ki Hadjar Dewantara beradaptasi dengan cara mengatur siasat melalui pengimplementasian pemikirannya tentang pertanian yang diterapkan pada Taman Siswa, serta partisipasi politiknya di *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat).

Oleh karena itu, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang. Selain ketertarikan penulis terhadap penulisan sejarah zaman Jepang yang sangat terbatas dalam sumber-sumber sejarahnya, penulis melihat hal-hal yang menarik untuk diulas lebih lanjut, yaitu bagaimana pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian. Selain itu, penulis juga akan membahas kebijakan pertanian pada masa pendudukan Jepang dan respons-respons dari tokoh atau golongan, khususnya dari Ki Hadjar Dewantara tersendiri, serta membahas implementasi pemikirannya tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang dan dampak seperti apa yang ditimbulkan oleh implementasi pemikirannya tersebut.

**Tinjauan Teoritis**

Pada perkembangannya, pemikiran yang dituangkan oleh Ki Hadjar Dewantara, telah melahirkan 2 (dua) induk pemikiran yang berpengaruh dalam paradigma kebangsaan Indonesia, yaitu kebudayaan dan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara membuat konsep kebudayaan yang berkepribadian dan berkarakter untuk bangsa sendiri, yaitu konsep Kebudayaan Nasional. Konsepnya berlanjut terhadap pemikiran mengenai pendidikan, dengan melahirkan sistem yang berdasarkan cara dan metode untuk bangsa Indonesia, yaitu sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan pada pemikiran mengenai pertanian, Ki Hadjar Dewantara mengawali pemikiran tersebut yang berasal dari pengalamannya pada masa pengasingan di Belanda (1913-1919), serta pandangannya secara terapan dan representasi dalam pendidikan.

Dari pemikiran-pemikiran tersebut, kemudian pada penulisan atas penelitian ini didasari atas landasan teori yang dikeluarkan oleh Nurdin Usman, yaitu implementasi. Menurut Nurdin Usman (2002:70), implementasi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan aksi, tindakan, aktivitas, serta wujud mekanisme dalam suatu sistem. Secara ketetapan, implementasi merupakan suatu perencanaan untuk mencapai tujuan dari apa yang dilaksanakannya. Berangkat dari pandangan tersebut, implementansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang merupakan suatu tindakan dalam siasat yang direncanakan dalam suatu pertemuan. Hal tersebut bertujuan untuk tetap terlaksananya aktivitas pengajaran dan pendidikan Taman Siswa di tengah belenggu konsekuensi dari pemerintah Jepang. Selain itu, implementasi pemikirannya tentang pertanian juga digunakan sebagai pelaksanaan atas partisipasi Ki Hadjar Dewantara dalam aktivitas pemerintah pendudukan di *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat).

**Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, terdiri dari (5) lima bagian, yaitu; Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pertanian, Kebijakan Pertanian pada Masa Pendudukan Jepang, Respons Ki Hadjar Dewantara terhadap Kebijakan Pertanian, Implementasi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pertanian, dan Dampak Implementasi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pertanian. Diketahui bahwa pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian, diawali dan diperhatikan oleh beliau pada masa kolonial Belanda. Pemikirannya tersebut, ternyata mempunyai keterkaitan dengan kebijakan Pemerintah Militer Jepang di bidang pertanian. Setelah itu, Ki Hadjar Dewantara memberi respons atas kebijakan tersebut, dengan kenyataan yang justru sebaliknya yang dihadapi olehnya atas konsekuensi yang ditimbulkan ke perguruan nasionalnya, yaitu Taman Siswa. Dengan demikian, hasil dan pembahasan selanjutnya adalah jawaban atas permasalahan dari fokus penelitian ini, yaitu implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang, serta bagaimana dampak atas pengimplementasiannya tersebut.

**Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pertanian**

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian memandang bahwa pertanian merupakan usaha kebudayaan yang mengenai kepandaian dan kompetensi manusia. Usaha kebudayaan terhadap pertanian ini, meliputi; kemampuan bercocok tanam dan mengolah tanah (*Poesara*, Agustus 1940:8). Usaha tersebut bukan hanya sekadar untuk menghasilkan dari proses aktivitas pertanian, namun juga turut untuk memperbaikinya atas kemampuan yang dimiliki, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Selanjutnya, pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian, ditujukan sebagai kemampuan untuk menciptakan inovasi atas bidang tersebut. Menurut Ki Hadjar Dewantara, inovasi sebagai usaha dalam bercocok tanam adalah segala daya dan upaya, serta cara-cara secara ilmiah (*wetenschappelijk*) yang dapat memperbesarkan hasil pengolahannya (*Wasita*, Februari 1936:28-32). Disitulah terlihat bahwa kebudayaan sebagai usaha untuk memperbaiki hidupnya tanaman. Selain itu, pandangannya mengenai pertanian juga dimaksudkan dalam hal apresiasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian. Ki Hadjar Dewantara menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dididik oleh “bebek” dalam segi pertaniannya (*Wasita*, September 1935:182). Oleh karena itu, langkah apresiasi terhadap pertanian merupakan cara untuk menghimpun kekuatan atas kebutuhan bangsa yang berdikari di tanah air sendiri. Dari pandangan-pandangan diatas, maka dapat ditarik suatu refleksi bahwa dasar dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian adalah kompetensi, inovasi, dan apresiasi.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian ini, kemudian diterapkan ke dalam kurikulum pelajaran di beberapa jenjang sekolah di Taman Siswa. Dalam tahap perkembangan awal, kurikulum pelajaran tentang pertanian diterapkan pada jenjang pendidikan Taman Guru. Penerapan kurikulum dari pelajaran tentang ilmu pertanian, kemudian diterapkan pada jenjang Taman Muda dan Taman Dewasa. Materi dari pelajaran ilmu pertanian untuk jejang Taman Muda, terdiri dari; ilmu pertanian dan perkebunan (*Land en Tunbouw*), secara teori dan praktik. Sedangkan pada Taman Dewasa, materi dari pelajaran ilmu pertanian untuk jenjang tersebut, terdiri dari: ilmu pertanian (sama seperti Taman Muda), pelajaran ilmu pertanian; Morfologi (daun, bunga, akar), Biji-bijian dan Spora, dan pemeliharaan tanaman, dengan referensi buku dari; “*Algemeene Plantenteelt*” karya Ochso, “*Grondbewerking*” karya Hydema, dan “*Mardi Tani*” karya Soemardjo (*Poesara*, Agustus 1935:224-225).

Selain dari jenjang pendidikan di sekolah, Taman Siswa juga membuat program penerapan pendidikan mengenai pertanian yang menyasar masyarakat di desa-desa, yaitu program Taman Masyarakat. Taman Masyarakat pertama kali dibuka pada 3 Juli 1933 di Taman Siswa cabang Jember (*Poesara*, September 1933:12). Dalam Pelaksanaannya sendiri, antara lain; penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran bersama masyarakat, penyuluhan koperasi untuk para petani, serta melakukan panen. Adanya Taman Masyarakat ini merupakan tujuan dari Taman Siswa untuk mendekatkan hubungan antara siswa dengan masyarakat sekitar, serta sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat terhadap mata pencahariannya, yaitu petani dan tukang kebun.

Selain sebagai terapan, Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian juga mengandung makna sebagai representasi dalam pendidikan. Pada beberapa tulisannya mengenai pendidikan, Ki Hadjar Dewantara menyelipkan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian. Maksud dari pertanian ini mempunyai makna dan tujuan penyampaian dalam tulisannya mengenai pendidikan di Taman Siswa. Seperti kita ketahui bahwa sistem pendidikan dari Taman Siswa yang mengikuti sistem *Among*, terdapat pula istilah perumpamaan yang berangkat dari sistem tersebut yang berhubungan dengan pertanian, yaitu *Among-Tani*. Istilah *Among-Tani* merupakan makna persuasif yang ditujukan bagi siswa-siswi Taman Siswa untuk menanamkan jiwa pendidikan yang bermanfaat sebagai pendukung perekonomian rakyat. Melalui *Among-Tani*, Taman Siswa hadir sebagai penghubung dengan masyarakat untuk menyebarkan benih-benih gotong royong di bidang pertanian (*Poesara*, November 1934).

Selanjutnya, makna representasi dari pertanian yang terdapat dalam tulisan mengenai pendidikan, seperti yang termuat dalam pidato Ki Hadjar Dewantara, melalui rapat umum Taman Siswa pada 2 Februari 1930 di Malang. Pada kesempatannya, Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa di tengah-tengah suasana pergerakan politik, Taman Siswa harus menjadi paman tani (*Wasita*, Agustus 1930:1-2). Makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut adalah dalam suasana di tengah suasana politik di Hindia Belanda, Taman Siswa sebagai perguruan harus bergerak untuk menanam benih-benih pengajaran dan pendidikan terhadap rakyat. Makna “paman” yang dimaksud adalah Taman Siswa harus sebagai penjaga agar terus menjalankan misi pendidikan, terlepas dari kepentingan apapun, khususnya bagi aktivitas dalam kepentingan politik.

Makna representasi pendidikan kemudian berlanjut dalam penjelasan yang mengenai konsep dasar-dasar pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa dasar dari pelaksanaan pendidikan itu adalah kemauan terhadap arah dan tuntunan anak, menurut kodratnya masing-masing. Ki Hadjar Dewantara lalu mengumpamakan anak-anak sebagai tanaman padi dan tenaga pendidik atau orang tua sebagai petani (*Keloearga*, November 1936). Maksud dari kedua hal tersebut, petani yang sejak awal menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman yang lain. Begitu pun juga dimaksudkan terhadap anak-anak, yang sudah mempunyai potensi dalam minat dan bakat masing-masing, tidak bisa untuk dipaksakan menjadi apa yang diinginkan oleh tenaga pendidik (pamong) dan orang tua atas tujuan-tujuan tertentu. Dari pemikiran-pemikiran tentang pertanian tersebut, ternyata mempunyai keterkaitan atas aktivitas Ki Hadjar Dewantara pada masa pendudukan Jepang, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian.

**Kebijakan Pertanian pada Masa Pendudukan Jepang**

Kebijakan di bidang pertanian merupakan salah satu prioritas Pemerintah Militer Jepang. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh langkah Jepang untuk mengumpulkan bahan logistik untuk kebutuhan perangnya. Pengumpulan bahan logistik perang yang diusahakan adalah bahan logistik untuk keperluan sandang (tekstil), bahan baku persenjataan, dan bahan makanan. Usaha tersebut dikenal dengan nama usaha untuk melipatgandakan hasil produksi. Bukan hanya hal yang berurusan dengan proses dan hasil dari penanamannya yang diusahakan, namun juga dikerahkan untuk urusan propaganda yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pertanian. Begitu juga usaha tersebut yang digencarkan melalui kebijakan pertanian yang terdiri dari; kebijakan sumber daya Alam (SDA) pertanian, serta kebijakan sumber daya manusia (SDM) pertanian.

Pada kebijakan sumber daya Alam (SDA) pertanian, Pemerintah Militer Jepang melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk ekstensifikasi dan pengenalan hal-hal baru dalam pertanian di Indonesia, yaitu kebijakan perluasan dan inovasi pertanian. Dalam kebijakan perluasan pertanian, Jepang melakukan usaha ekspansi lahan pertanian, seperti usaha pembabatan hutan, pengalihan lahan untuk sektor pertanian, perbaikan pabrik-pabrik pertanian yang rusak, serta pembangunan saluran irigasi. Dalam kebijakannya itu, telah meninggalkan beberapa peninggalan yang berdampak dari pelaksanaannya. Peninggalan-peninggalan itu seperti; pembukaan lahan hasil dari pembabatan hutan seluas 1.500 hektar untuk lahan pertanian yang juga membuka desa terbarukan di Subang (seperti desa Yamada; sekarang desa Jatireja), serta pembangunan saluran irigasi Yoshiro di Yogyakarta (sekarang berganti nama menjadi Selokan Mataram) pada tahun 1943 (Aiko Kurasawa, 1993:13-15).

Kebijakan sumber daya Alam pertanian selanjutnya adalah inovasi pertanian. Kebijakan inovasi pertanian ini merupakan usaha untuk mengenalkan teknik dan bibit baru untuk aktivitas pertanian, serta pemberian insentif pertanian (perlombaan dan hadiah). Dalam pengenalan teknik dan bibit baru, Jepang memperkenalkan kepada masyarakat mengenai teknik penanaman padi yang berdasarkan garis lurus dengan jarak tanam tertentu secara berurutan. Kebijakan dari inovasi pertanian selanjutnya adalah pemberian insentif pertanian. Dalam kebijakan tersebut, Jepang mengadakan pemberian hadiah dan perlombaan untuk para petani. Pada Januari 1943, Jepang memberi hadiah berupa ijazah untuk siapa saja yang melakukan penanaman padi lebih dari 0,2 hektar dan diadakan di beberapa daerah di pulau Jawa (*Kan Po*, Januari 1943:10). Selain acara pemberian hadiah, Jepang juga mengadakan perlombaan untuk menambah penghasilan padi. Perlombaan ini diadakan pada bulan Juli 1943 hingga bulan Juni 1944 oleh pemerintah pusat (*Gunseikanbu*), melalui departemen urusan perekonomian (*Sangyoobu*). Peserta yang ikut adalah para petani yang menanam lahan lebih dari 0,3 hektar (*Kan Po*, Juli 1943:22). Hadiah bagi para pemenang beraneka ragam, seperti; alat-alat pertanian (cangkul dan sekop), hewan ternak, dan sejumlah uang tunai.

Selain dari kebijakan sumber daya alam, Pemerintah Militer Jepang juga mengadakan kebijakan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Jepang melaksanakan kebijakan mengenai usaha untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja manusia dan media pencerdasan tentang pertanian, yaitu kebijakan propaganda dan pelatihan pertanian. Pada kebijakan propaganda pertanian, Jepang melakukan usaha propaganda melalui wadah-wadah, antara lain; wadah langsung (penyampaian dari tokoh masyarakat) dan wadah tidak langsung (film, radio, surat kabar, dan majalah). Dalam wadah langsung, Jepang mengerahkan beberapa tokoh masyarakat dari kalangan pejabat daerah dan tokoh agama untuk mengerahkan usaha mempromosikan tanaman dan arti dari usaha untuk peningkatan hasil produksi. Sedangkan dalam wadah tidak langsung, Jepang melakukan propaganda pertanian melalui media-media, seperti; film, radio, dan majalah. Media dari wadah proganda tersebut, justru merupakan wadah yang lebih masif dibandingkan dengan penyampaian secara langsung. Hal tersebut dipengaruhi oleh langkah serius Jepang secara intensif pada bidang propaganda tersendiri dalam mempublikasikan keadaan peperangannya, bersamaan juga langkah untuk mendorong usaha peningkatan hasil produksi, yaitu propaganda pertanian.

Selanjutnya, kebijakan sumber daya manusia pertanian yang dilaksanakan Jepang adalah pelatihan pertanian. Pada kebijakan tersebut, Jepang mengadakan program-program seperti; latihan pertanian bagi petani, sekolah khusus ilmu pertanian, dan kursus latihan bagi pegawai pertanian. Jepang mengadakan pelatihan dan membangun sebuah asrama pertanian, yaitu *Nomin Dojo*. Pelatihan tersebut menyediakan asrama khusus yang dikelilingi oleh lahan pertanian yang luas untuk para petani-petani terpilih dari kalangan pemuda yang berusia 17-20 tahun, serta dianggap bisa menjadi pelopor pertanian di desanya masing-masing. Pelatihan pertanian *Nomin Dojo* pertama diadakan pada 14 Januari 1943 oleh perwakilan pusat (*Gunseikanbu*) Okazaki yang diikuti 210 peserta, serta pelatihan kedua diadakan pada 28 Februari 1943 di Jakarta, yang diikuti oleh 130 peserta, dengan masa pelatihan selama 6 bulan (*Kan Po*, Februari 1943:13). Program selanjutnya adalah Pembukaan sekolah khusus ilmu pertanian. Jepang membuka sekolah-sekolah pertanian yang berlokasi di Bogor, Sukabumi, dan Malang. Pada 6 April 1943, sekolah-sekolah tersebut telah menampung murid-murid pertanian, antara lain; 90 murid di Bogor, 60 orang di Sukabumi, dan 57 orang di Malang (*Kan Po*, April 1943:17). Bagi murid-murid yang dapat menamatkan di sekolah pertanian, mendapatkan kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah tinggi ilmu pertanian. Pada 22 Mei 1944, telah diadakan sekolah tinggi ilmu pertanian di Malang, dengan membuka kuota pendaftaran sebanyak 90 orang; 30 calon mahasiswa untuk bidang pertanian, 30 calon mahasiswa untuk bidang kehutanan, serta 30 calon mahasiswa untuk bidang peternakan (*Kan Po*, Juni 1944:44). Sekolah tinggi tersebut juga dibarengi dengan pembukaan sekolah tinggi teknik di Surabaya.

Selain dari sekolah, Jepang juga mengadakan program kursus latihan bagi pegawai pertanian. Program itu bernama “Koersoes Latihan Pegawai Pertanian” (*Genjumin Nogyo Kanri Rensei Koshukai*), yang disponsori langsung oleh Pemerintah Pusat (Aiko Kurasawa, 1993:15). Kursus tersebut diselenggarakan pertama kali pada 19-28 Agustus 1943, serta pelatihan yang kedua pada 3-12 Juni 1944 (*Kan Po*, Juni 1944:46). Materi yang disampaikan, antara lain; ceramah oleh ahli-ahli pertanian dari Jepang, serta praktik pertanian langsung di Stasiun Percobaan Pertanian di Bogor. Selain itu, terdapat juga program yang bernama *Shidoin*. Program tersebut berfungsi untuk mencetak tenaga pertanian (sosialisator) resmi dari pemerintah, yang memberikan segala macam saran, perintah, dan informasi kepada petani, dari tingkat kabupaten (*noji-shidokan*) hingga tingkat desa (*ku-shidokan*). Hal tersebut bertujuan untuk penyuluhan terhadap petani tentang cara untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta sebagai mediator informasi tentang arahan aktivitas pertanian antara pemerintah dengan petani, baik dari pemerintah pusat, maupun dari pemerintah daerah.

Pada pelaksanaannya, kebijakan pertanian pada masa pendudukan merupakan tindakan tegas Jepang dalam memobilisasi hasil pertanian yang dibutuhkan. Tindakan tegas itu dengan melakukan instruksi atas sistem kerja yang cepat dan efisien bagi masyarakat yang terlibat dalam usaha dari kebijakan tersebut. Namun dalam kenyataannya, kebijakan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang, sebagian besar ditujukan atas kebutuhannya untuk logistik Perang Pasifik. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kasus kelaparan banyak melanda di masyarakat. Atas kondisi tersebut, terdapat respons-respons dari berbagai kalangan dan tokoh yang mempunyai pandangan, serta menunjukkan sikap perlawanan terhadap Jepang.

Pada pelaksanaan atas kebijakan sumber daya alam (SDA) pertanian, terdapat respons-respons yang menunjukkan sikap kekecewaan dan demotivasi atas kebijakan tersebut. Seperti pada kasus kebijakan perluasan pertanian, kebanyakan petani kehilangan semangat kerja karena kebijakan tersebut merupakan suatu kepatuhan semata, bahkan hingga beberapa di antaranya meninggalkan profesi pertanian. Akibatnya, respons tersebut berlanjut dengan aksi perlawanan, seperti aksi pemberontakan yang dipelopori oleh Haji Aksan di desa Kaplongan, Indramayu pada tahun 1944 (Akira Nagazumi, 1988:95-96). Aksi tersebut beralasan karena adanya ketidakadilan terhadap kepemilikan tanah atas perluasan pertanian yang tidak merata untuk petani. Sedangkan pada kasus kebijakan inovasi pertanian, terdapat respons bahwa pemberian insentif merupakan bentuk dukungan dan apresiasi Jepang terhadap bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga mendapatkan respons penolakan mengenai pengenalan teknik dan bibit baru, bahwa itu merupakan wujud degradasi atas kualitas hasil pertanian dari tanaman lokal yang lebih dihargai oleh masyarakat, karena lebih enak dan dianggap mempunyai mutu tinggi, dibandingkan jenis padi yang baru.

Selanjutnya pada pelaksanaan atas kebijakan sumber daya manusia (SDM) pertanian, terdapat respons-respons mengenai sikap ketidaksungguhan dan suatu pengalaman terbaru. Seperti pada kasus kebijakan propaganda pertanian, para pelaku yang menjalankan propaganda di bidang tersebut merupakan sebuah kepatuhan dan simbolis yang diperintahkan oleh Jepang, sehingga tidak ada tindakan yang bersungguh-sungguh untuk dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan pada kasus pelatihan pertanian, terdapat respons dari kalangan murid-murid bahwa sekolah khusus ilmu pertanian merupakan sekolah yang diarahkan untuk pendidikan bertani secara praktis dan melatih daya semangat untuk bekerja. Namun ada pula yang menganggap bahwa pelatihan pertanian hanya sebagai kepatuhan masyarakat atas ketegasan Jepang, seperti halnya yang dilakukan oleh para petani.

Pada respons-respons terhadap kebijakan pertanian diatas, terdapat berbagai pandangan dan tindakan perlawanan dari kalangan dan tokoh terhadap baik dan buruknya Jepang lakukan atas kebijakan tersebut. Dalam skala yang besar, respons tersebut menimbulkan aksi yang terorganisir, seperti aksi gerakan bawah tanah. Aksi ini dipelopori oleh beberapa pihak yang terlibat, antara lain; Amir Syarifuddin, Sutan Syahrir, serta mendorong partisipasi dari kalangan pemuda dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun pada ujungnya, respons-respons dari tindakan perlawanan dapat dilumpuhkan oleh polisi Jepang (*Kempeitai*) melalui penangkapan dan hukuman yang diberikan, hingga kebijakan tetap berjalan sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia.

**Respons Ki Hadjar Dewantara terhadap Kebijakan Pertanian**

Selain respons-respons dari berbagai kalangan dan tokoh lainnya, terdapat juga respons khusus dari Ki Hadjar Dewantara terhadap pelaksanaan atas kebijakan pertanian pada masa pendudukan Jepang. Respons-respons tersebut, terdiri dari; respons positif dan respons solutif. Dalam respons positif, Ki Hadjar Dewantara mengapresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh Jepang atas kebijakan di bidang pertanian yang pada masa sebelumnya dipandang sebelah mata. Seperti pada kesempatan berpidato radio di Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), serta berpidato di Benteng Perjuangan Jawa (*Djawa Sentotai*), Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa usaha untuk memajukan dan menghargai pertanian untuk mengurus kebutuhannya sendiri, merupakan kewajiban dan kekuatan cita-cita bersama untuk meraih kemenangan perang Asia Timur Raya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Selain itu, respons solutif juga diberikan oleh beliau ketika menghadapi permasalahan dilematis atas penutupan sekolah-sekolah Taman Siswa oleh pemerintah Jepang. Jepang mengganti sejumlah uang ganti rugi atas penutupan sekolah tersebut, namun Ki Hadjar Dewantara menolaknya, karena dapat melunturkan terhadap asas dan prinsip Taman Siswa (Bambang Sokawati Dewantara, 1984:122). Sebagai bentuk alternatif oleh saran beliau, Taman Siswa diberikan lahan sawah yang digunakan untuk media praktik belajar pertanian bagi murid-murid Taman Siswa. Sebagaimana pula hal tersebut merupakan kebermanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap ilmu pertanian yang eksistensinya sedang berkembang di zaman Jepang.

Respons-respons yang diberikan oleh Ki Hadjar Dewantara terhadap pelaksanaan atas kebijakan Pemerintah Militer Jepang di bidang pertanian, kenyataannya tidak sejalan dengan konsekuensi dari bidang tersebut. Konsekuensi itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan atas pengerahan tenaga-tenaga dari rakyat untuk memobilisasi kebutuhan perang (Bisuk Siahaan, 1996). Akibatnya, Jepang mengeluarkan aturan tentang sekolah partikelir (*Osamu Seirei No. 16/1944*) yang melarang atas pendirian sekolah menengah bersifat umum, dan hanya memperbolehkan sekolah yang bersifat kejuruan (Ki Sajoga, 1981:262). Imbas dari aturan tersebut, perguruan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu Taman Siswa, terkena dampaknya yang berujung dengan pembubaran jenjang sekolah menengahnya (Taman Dewasa dan Taman Madya). Atas permasalahan tersebut, Ki Hadjar Dewantara mengatur siasat agar Taman Siswa tetap mempertahankan untuk seluruh jenjang sekolahnya, melalui implementasi pertanian terhadap Taman Siswa, serta memperjuangkan melalui aspirasi pada aktivitasnya di lembaga bentukan pemerintah Jepang dalam implementasi pertanian terhadap *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat).

**Implementasi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pertanian**

Dalam pengimplementasian pertanian terhadap Taman Siswa, langkah awal yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah mengadakan pertemuan bagi seluruh pihak yang terlibat di Taman Siswa, seperti para jajaran Majelis luhur dan pendidik pada Maret 1944. Hasil dari pertemuan tersebut, Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa bersepakat untuk membuka sekolah yang berbasis kejuruan, yaitu sekolah Taman Tani. Sekolah Taman Tani merupakan jenjang pendidikan sekolah yang mempelajari dan menerapkan ilmu pertanian ke dalam media bercocok tanam di lahan persawahan, sebagai pengganti dari sekolah umum yang dibubarkan. Pada 19 Juni 1944, sekolah Taman Tani secara resmi dibuka oleh Taman Siswa (Darsiti Soeratman, 1974:202). Pada prosesi peresmiannya, Ki Hadjar Dewantara membacakan pidato pembukaan Taman Tani, seperti bunyi dari salah satu bait pidatonya yaitu:

“Hari ini, hari pembukaan sekolah pertanian Taman Tani Taman Siswa di Mataram-Jogjakarta, adalah hari jang sangat mulia. Sebenarnja sudah beberapa tahun, sebelum petjahnja perang Asia Timur Raya ini, kita telah merentjanakan berdirinja sekolah-sekolah perusahaan (kejuruan), disamping sekolah-sekolah menengah kita jang bersifat umum. Dasar dari pada rentjana kita itu tak bukan dan tak lain, ialah untuk membelokkan aliran pendidikan setjara Barat, jang sangat terlampau mengutamakan ketjerdasan fikiran (*intellectualism*), ke-arah pendidikan semangat bekerja (*Karya Ki Hadjar Dewantara*, 1977:153).”

Kutipan tersebut mengandung makna tentang arah baru pengajaran dan pendidikan Taman Siswa. Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa murid-murid Taman Siswa yang diajarkan bukan hanya sebatas pengetahuan teori saja, tetapi juga mengajarkan pendidikan semangat bekerja dan berjiwa kooperatif. Pada bait dari pidato lainnya juga terdapat makna representatif dari kisah kejayaan masa lampau yang dibacakan oleh beliau, demi meyakinkan Jepang agar Taman Siswa mendapatkan kesan positif dari pembukaan sekolah Taman Tani.

Setelah pembukaan sekolah Taman Tani, murid-murid Taman Siswa begitu antusias dan besar keingintahuannya terhadap praktik pertanian di sawah. Sekolah tersebut membuka 3 (tiga) kelas, antara lain; kelas I, kelas II, dan kelas III. Selain itu, kurikulum pendidikan yang dijalankan sama seperti yang berlaku seperti Taman Dewasa, namun ditambahkan kurikulum pelajaran baru, seperti; bahasa Jepang, *Taiso* (olahraga), dan latihan baris-berbaris (Hilmy Yusuf B.A, 1974:270). Kemudian, praktik pertanian juga dilangsungkan oleh murid-murid sekolah Taman Tani di lahan sawah sumbangan pemerintah yang seluas 11 hektar dan terletak di belakang halaman sekolah. Dengan adanya lahan sawah tersebut, pada saat waktunya panen tiba, para murid dan pendidik (*pamong*) ditugaskan untuk menjaga malam (beronda) secara bergiliran (Ki Sajoga, 1981:264).

****

**Gambar 1. Sketsa Bangunan Sekolah Taman Tani**

(*Tamansiswa 30 Tahun (1922-1952); Cetakan ketiga*, 1981)

Pembukaan sekolah Taman Tani merupakan jawaban atas konsekuensi dari Jepang melalui aturan sekolah partikelir yang diterima oleh Taman Siswa. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi dukungan Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa terhadap kebijakan pertanian pada masa pendudukan Jepang, khususnya kebijakan sumber daya manusia (SDM) pertanian, yaitu pelatihan pertanian. Para murid tidak hanya diberikan pelatihan cara dan teknis bercocok tanam, namun juga dilatih semangatnya, sebagaimana proses untuk meningkatkan kompetensi masing-masing murid di bidang pertanian. Berjalannya kegiatan pendidikan dan pengajaran sekolah Taman Tani di Taman Siswa sebagai sekolah bersifat kejuruan, kenyataannya tidak diikuti sepenuhnya oleh Taman Siswa. Sekolah Taman Tani tetap menerapkan sistem sekolah umum yang sebelumnya telah dijalankan seperti di Taman Dewasa dan Taman Madya.

Selain itu, pengimplementasian pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian berikutnya adalah implementasi pertanian terhadap *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat). Lembaga *Chuo Sangi-In* merupakan lembaga dewan yang berfungsi sebagai wadah pemberian usulan dan jawaban atas pertanyaan dalam keputusan untuk berjalannya kebijakan Pemerintah Militer Jepang di Indonesia. Agenda dari *Chuo Sangi-In* adalah melakukan perundingan dan persidangan untuk membantu kepentingan atas pelaksanaan atas kebijakan Pemerintah Militer Jepang untuk Perang Pasifik. persoalan yang diperbolehkan untuk dibahas dalam sidang *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat), yaitu; pengembangan pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, pendidikan dan penerangan, industri dan ekonomi, kemakmuran dan bantuan sosial, dan kesehatan (Arniati Prasedyawati Herkusumo, 1986:29). Secara keanggotannya, *Chuo Sangi-In* diisi oleh beberapa orang Jepang dari utusan pemerintah, serta sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh nasional, khususnya Ki Hadjar Dewantara tersendiri.

Dalam pengimplementasian pertanian terhadap *Chuo Sangi-In*, Ki Hadjar Dewantara memberikan aspirasi dengan menjawab atas pertanyaan, serta memberikan usulan dalam kesempatan persidangan yang dilaksanakan. Pada 12 – 16 Agustus 1944, dalam sidang *Chuo Sangi-In* ke-IV yang membahas tentang penyempurnaan hasil produksi, Ki Hadjar Dewantara memberikan pernyataan bahwa perlunya dibentuk suatu organisasi “Benteng Perjuangan Jawa” yang kuat dan bertahan lama, demi meningkatkan hasil produksi (pertanian) yang maksimal, serta mengadakan susunan perburuhan baru dalam arti mengadakan kewajiban bekerja dan mengatur cara bekerja (Arniati Prasedyawati Herkusumo, 1986:71). Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa salah satu cara untuk membangkit semangat kerja, seperti usaha untuk peningkatan hasil produksi adalah pemberian apresiasi terhadap para pekerja sebagai prajurit ekonomi pembela tanah air di masa perang (Arniati Prasedyawati Herkusumo, 1986:72).

Implementasi pertanian Ki Hadjar Dewantara selanjutnya adalah pada kesempatan persidangan *Chuo Sangi-In* yang ke-IV. Dalam sidang tersebut, terdapat bahasan yang mengenai usulan memperbaiki masalah penyerahan padi. Ki Hadjar Dewantara memberikan pendapat bahwa tindakan yang perlu diambil dalam hal penyerahan padi adalah memperdalam kesadaran rakyat tentang pentingnya melipatgandakan hasil bumi, menyediakan alat pertanian sebagai hadiah penghargaan atas kebaktian, serta membentuk koperasi pertanian (*Kumiai*) di tiap-tiap desa (*ku*) (Arniati Prasedyawati Herkusumo, 1986:88).

Sidang usulan tersebut kemudian dilanjutkan ke dalam rapat Dewan Penasihat (*Sanyo*) yang berlangsung pada 16 Desember 1944, dengan pokok pembahasan tentang penjualan padi kepada pemerintah. Pada 8 Januari 1945, rapat tersebut dilanjutkan pada Sidang *Sanyo Kaigi* ke-IV yang diketuai oleh Soekarno, dengan pokok pembicaraan penjualan padi dan harga barang (Notula Sidang *Sanyo Kaigi* ke-IV, 8 Januari 1945:1). Pembicaraan dalam tema sidang, antara lain; sebab-sebab kurang baiknya pengumpulan padi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, agar dapat menstabilkan harga barang. Dalam sidang tersebut, Ki Hadjar Dewantara memberikan pendapat mengenai usaha untuk pengumpulan padi bahwa pentingnya memperhatikan distribusi, kontrol, dan alat pengumpulan (lumbung) agar beras yang dihasilkan, dapat tersalurkan ke masyarakat, khususnya dari desa untuk desa yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Ki Hadjar Dewantara satu sependapat terhadap pernyataan dari salah satu anggota sidang, yaitu Mohammad Hatta bahwa perlunya menjalani usaha praktis terhadap aspek-aspek kecil, demi menanggulangi kekurangan padi, serta bahaya-bahaya yang siap untuk dihadapi (Notula Sidang *Sanyo Kaigi* ke-IV, 8 Januari 1945:18). Hasil-hasil putusan dari sidang tersebut, dijadikan usulan untuk pembahasan dalam sidang *Chuo Sangi-In* berikutnya.

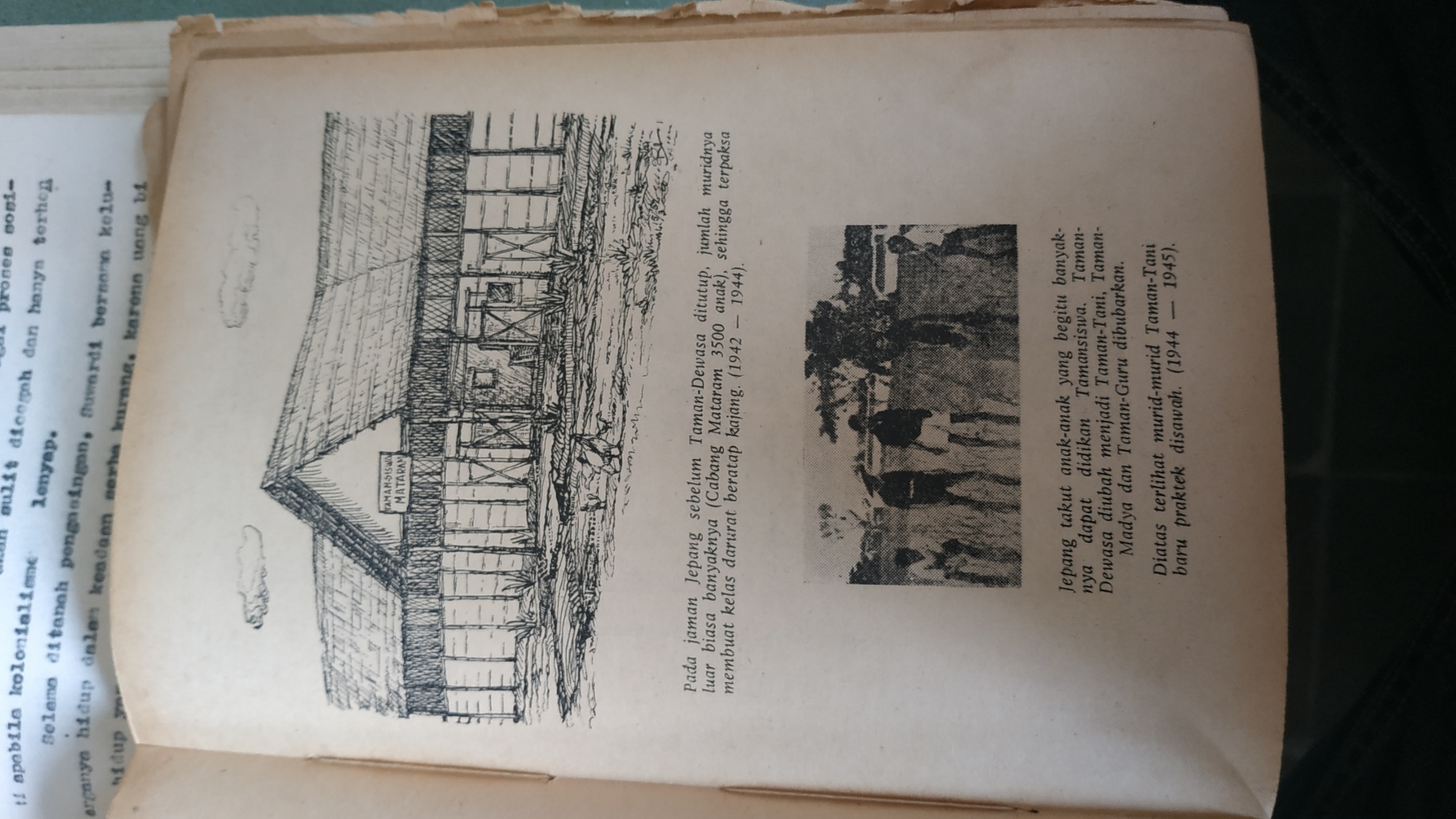
Pengimplementasian pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian terhadap *Chuo Sangi-In* merupakan usaha atas pemberian aspirasi dalam usulan dan jawaban atas pertanyaan, mengenai cara dan proses untuk meningkatkan hasil produksi. Ki Hadjar Dewantara memperhatikan aspek apresiasi terhadap para profesi pertanian, agar dapat meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas untuk hasil yang memuaskan. Hal tersebut beliau seleraskan dengan dasar dari pemikirannya mengenai pertanian, yaitu memperhatikan aspek apresiasi atas segala dari usaha pertanian. Partisipasi Ki Hadjar Dewantara dan anggota-anggota *Chuo Sangi-In* lainnya, telah mempengaruhi pelaksanaan atas kebijakan Pemerintah Militer Jepang di Indonesia, khususnya kebijakan di bidang pertanian.

**Dampak Implementasi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pertanian**

Pada pelaksanaannya, implementasi-Implementasi pemikiran yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian, telah menimbulkan dampak-dampak atas tindakan dan keputusan yang beliau lakukan. Dampak-dampak yang ditimbulkan, antara lain; sekolah umum berbalut kejuruan, keputusan Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian dalam *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat), dan pandangannya mengenai pertanian pada saat menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan dari implementasi pemikirannya tentang pertanian terhadap Taman Siswa adalah dengan membuka sekolah Taman Tani. Pembukaan sekolah Taman Tani di Taman Siswa merupakan sebuah alternatif dari aturan pemerintah Jepang yang mengekang terhadap sekolah partikelir, serta pelarangan terhadap sekolah yang dicap sebagai sekolah nasionalis seperti Taman Siswa. Dari alternatif itu, kemudian Ki Hadjar Dewantara mensiasati sekolah Taman Tani dengan bentuk sekolah umum berbalut kejuruan. Bentuk tersebut adalah sebuah kenyataan bahwa Taman Siswa tetap menjalani kegiatan pengajaran dan pendidikan secara normal seperti pada biasa sebelumnya. Siasat dari Ki Hadjar Dewantara ini merupakan gerakan atas tantangan sebuah zaman yang disebut dengan gerakan *Ngentung*.

Istilah *”Ngentung”* merupakan istilah dari bahasa Jawa, yaitu *entung* yang berarti kepompong, sehingga gerakan tersebut merupakan gerakan yang mengikuti seperti kepompong yang diam tidak bergerak, terlihat mati, tetapi terus hidup untuk sewaktu-waktu ada kesempatan hidup kembali seperti sedia kala dalam meneruskan perjuangan hidup (Mochammad Tauchid, 1963:64). Gerakan *Ngentung* diawali dari kedatangan Jepang yang menguasai Indonesia dalam keadaan Perang Pasifik, dengan secara perlahan semakin mengancam eksistensi berdirinya Taman Siswa. Ancaman itu disebabkan oleh semakin menurunnya cabang-cabang sekolah Taman Siswa di seluruh Indonesia, serta terputusnya fungsi pengawasan pusat terhadap cabang-cabang sekolah di luar Pulau Jawa. Atas kondisi tersebut, pada 25-28 Maret 1944, Ki Hadjar Dewantara melaksanakan Rapat Besar Umum Taman Siswa yang ke-IV di Yogyakarta (Ki Sajoga, 1981:264). Pembicaraan rapat adalah mengenai situasi dan keadaan Taman Siswa di tengah penguasaan Jepang, serta bagaimana sikap Taman Siswa yang harus dijalankan. Hasil dari rapat tersebut bahwa Taman Siswa tetap mempertahankan perjuangan hidup sekecil apapun bentuknya, kemudian disempurnakan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai taktik *Ngentung* dan memelihara kebudayaan nasional.

**Gambar 2. Dokumentasi Murid-Murid Sekolah Taman Tani**

(*Tamansiswa 30 Tahun (1922-1952); Cetakan ketiga*, 1981)

Mengenai gerakan *Ngentung*, Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa gerakan “*Ngentung*” merupakan suatu gerakan untuk mempertahankan harga diri dan prinsip Taman Siswa dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Perkataan tersebut, seperti pada kesempatan Ki Hadjar Dewantara saat diwawancarain oleh anaknya, Bambang Sokawati Dewantara sebagai berikut:

“Ya, tetapi Tamansiswa tidak pernah menunjukkan sikap yang memalukan, bukan? Dengan gerakan *Ngentung* kita berlawan terus. Kita turuti bunyi Maklumat itu (*Osamu Seirei No. 16/IV/1944*) dengan merombak dan mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani dan Taman Rini (sekolah kepandaian putri). Namun di balik selubung Sekolah-sekolah *vak* (kejuruan) itu, asas pendidikan Taman Siswa, asas kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan kita laksanakan terus. Banyak orang tidak memperhatikan bahwa dengan gerakan *Ngentung* itu sesungguhnya kita melakukan *lijdelijk verzet* (menolak) sekali lagi, dalam bentuk dan cara berbeda dari cara yang kita pakai ketika pada tahun 1932 kita menggagalkan *Wilde Scholen Ordonantie* (Ordonansi Sekolah Liar) pemerintah Hindia Belanda (Bambang Sokawati Dewantara, 1989:69-70).”

Dari perkataan tersebut, Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa gerakan *Ngentung* juga merupakan gerakan perlawanan Taman Siswa terhadap Pemerintah Militer Jepang, sama dengan beliau lakukan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda sebelumnya, tetapi cara dan penyampaiannya berbeda. Perlawanan tersebut diibaratkannya seperti perlawanan Taman Siswa terhadap aturan Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Hal yang membedakan adalah perlawanan yang diberikan secara gerilya, tertib, dan memberi kesan damai (tidak melawan) untuk tetap meneguhkan prinsip dan asas Taman Siswa.

Gerakan tersebut, pada akhirnya telah memberikan esensi dasar dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian, yaitu esensi kompetensi terhadap kemampuan pertanian, sekaligus mengajarkan apresiasi terhadap murid-murid atas profesi pertanian (petani), baik itu menikmati proses, maupun hasil panennya. Di luar jam waktu belajar, para murid Taman Siswa dikerahkan untuk membantu petani di sawah dan memberikan bantuan kepada para tenaga *Romusha* (Ki Soenarno Hadiwijoyo, 2006:54-55). Selain dari esensi yang diberikan, implementasi tersebut juga merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan dari segala ancaman yang diberikan oleh Jepang. Bagi para pendidik di Taman Siswa, gerakan tersebut merupakan bentuk pengabdian dan perjuangan dalam menjalankan pendidikan dengan cara bergerilya. Sedangkan bagi murid-murid, gerakan itu merupakan suatu pengalaman yang memberikan semangat dalam mengenyam pendidikan, berhati-hati, sekaligus hanya sekali terjadi di sepanjang sejarah hidup Taman Siswa. Seluruh elemen di Taman Siswa begitu konsisten dalam melakukan gerakan *Ngentung* selama masa pendudukan Jepang bergulir, meskipun ancaman dari pemerintah Jepang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian adalah keputusannya mengenai pertanian dalam *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat). Seperti pada contoh kasus pasca dari Sidang *Chuo Sangi-In* yang ke IV, Ki Hadjar Dewantara berpidato mengenai putusan sidang tersebut pada pertemuan Rapat *Jawa Hoko Kai* di Yogyakarta. Secara garis besar, pidato tersebut memberikan keputusan bahwa aspirasi Ki Hadjar Dewantara mengenai “Benteng Perjuangan Jawa”, telah menjadi salah satu saran yang solutif terhadap permasalahan kekurangan bahan baku dari hasil produksi untuk ketahanan pangan (benteng) rakyat di masa perang. Keputusan berikutnya adalah pemberian laporan dari jawaban atas pertanyaan sidang *Chuo Sangi-In* yang ke-VI. Dalam laporan itu, Ki Hadjar Dewantara membacakan laporan bahwa cara untuk mempertinggi harkat dan martabat penduduk adalah melakukan latihan-latihan, yaitu latihan untuk memperkuat kesadaran ekonomi rakyat, seperti mengembangkan koperasi di kalangan rakyat, contohnya ialah koperasi pertanian. Hal tersebut dilakukan sebagaimana untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap kemandirian untuk rakyat, serta untuk diri sendiri.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, partisipasi Ki Hadjar Dewantara terhadap *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat), bersama para anggota lainnya merupakan wadah yang digunakan sebagai wadah untuk bertaktik gerilya politik dan kooperatif untuk mengkonsolidasi kekuatan gerakan kemerdekaan nasional (Ki Hadjar Dewantara, 1952:122). Ki Hadjar Dewantara memberikan respons bahwa *Chuo Sangi-In* merupakan wadah yang tidak lebihnya seperti dewan yang disebut dengan dewan “panggung boneka” belaka (Bambang Sokawati Dewantara, 1989:67-68). Anggapan tersebut berangkat dari permasalahan atas pemberian jawaban atas pertanyaan dan usul secara solutif, tetapi pada kenyataannya sebagian besar tidak digubris oleh Pemerintah Militer Jepang yang hanya mewujudkan atas aspirasi-aspirasi untuk kepentingan perangnya.

Atas permasalahan tersebut, Ki Hadjar Dewantara memberikan pendapat di *Chuo Sangi-In* untuk kepentingan lain, seperti urusan pengajaran dan pendidikan nasional. Dalam kesempatan sidang *Chuo Sangi-In* ke-VII, Ki Hadjar Dewantara memberikan usulan agar Jepang membuka kembali sekolah menengah partikelir yang bersifat umum (Arniati Prasedyawati Herkusumo, 1986:98-99). Usulan tersebut kemudian ditandatangani oleh 21 orang anggota *Chuo Sangi-In*, dengan catatan bahwa sekolah-sekolah partikelir yang pantas mendirikan dan memelihara sekolah umum, yaitu Taman Siswa dan Muhammadiyah, serta berlaku secara daerah dan tidak secara pusat (Ki Sajoga, 1981:267). Akan tetapi, kenyataan atas pemberlakuan kesepakatan tersebut, diulur-ulur oleh Pemerintah Militer Jepang. Penguluran yang dilakukan oleh Pemerintah Mililter Jepang, berujung pada malapetaka atas peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang merupakan penanda akhir dari kisah masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, perhatian Ki Hadjar Dewantara terhadap pertanian masih diperdengungkan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara memandang pertanian merupakan wujud dari pertahanan bangsa dan negara. Seperti pada kutipan dari pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian dalam suasana kemerdekaan Indonesia sebagai berikut:

“Oesaha-oesaha pertanian, perdagangan, pertoekangan, kesehatan, pengadjaran, pendidikan oemoem, keboedajaan d.s.b., soenggoehpoen dibelakang garis perdjoeangan letaknja, akan tetapi sekali-sekali ta’ boleh dilengahkan. Perloelah segala oesaha dibelakang garis itoe teroes berdjalan, oentoek mendjaga, djangan sampai negara kita kehabisan kekoeatan, karena ta, dapat mengganti apa jang patah atau poetoes (*Pantja Raja*, 15 November 1945:1).”

Dalam pandangan itu, usaha pertanian merupakan usaha untuk menjaga garis belakang negara Indonesia. Menurut Ki Hadjar Dewantara, hal-hal yang berhubungan dengan pertanian tidak boleh diabaikan, sebagaimana pertanian merupakan suatu kekuatan untuk negara dalam mewujudkan pertanian nasional yang berdaulat, adil, dan makmur.

**Kesimpulan**

Dalam mengembangkan pemikiran mengenai pertanian, Ki Hadjar Dewantara memandang bahwa pertanian merupakan usaha kebudayaan yang mengenai kepandaian dan kompetensi manusia dalam bercocok tanam dan mengolah tanah. Untuk itu, temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa penelitian terhadap pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian, telah menghasilkan beberapa pandangan beliau mengenai bidang tersebut, seperti pertanian sebagai terapan dan pertanian sebagai representasi dalam pendidikan. Pemikiran tersebut ditemukan melalui tulisan-tulisan beliau yang terdapat di surat kabar dan majalah, khususnya di majalah terbitan Taman Siswa seperti; *Keloearga*, *Wasita* dan *Poesara*. Dari tulisan-tulisan itu ditemukan bahwa dasar dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian adalah kompetensi, inovasi, dan apresiasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian.

Selain itu, terdapat pula temuan mengenai istilah atau konsep dari pemikirannya tentang pertanian. Seperti istilah *Among-Tani* yang menjadi representasi di dalam Taman Siswa agar selalu mengedepankan nilai apresiasi dan pengabdian terhadap sosial-budaya masyarakat, khususnya untuk petani sebagai ujung tombak mata pencaharian masyarakat pada umumnya di Indonesia. Selanjutnya, terdapat juga istilah “*Ngentung*” (seperti kepompong) yang merupakan gerakan atau taktik yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara untuk bersiasat di Taman Siswa dalam menghadapi tantangan dan perlawanan pada masa pendudukan Jepang. Ki Hadjar Dewantara mengerti terhadap kedudukan Jepang yang lebih kuat dalam menghadapi zaman peperangan (Perang Dunia II), sehingga perjuangan dan pergerakan dalam perlawanan harus digencarkan secara penuh pertimbangan dan hati-hati.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian ini ternyata mempunyai keterkaitan atas aktivitas beliau pada masa pendudukan Jepang, khususnya terhadap kebijakan di bidang pertanian. Kebijakannya tersebut telah memunculkan respons-respons dari beberapa tokoh dan golongan, khususnya dari Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara memberikan respons positif dan solutif terhadap kebijakan pertanian pada masa pendudukan Jepang. Menurutnya, Jepang telah memberikan perhatian lebih terhadap aspek pertanian di Indonesia yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun dalam pemberian respons itu pada kenyataannya telah menjadi tantangan bagi Ki Hadjar Dewantara atas konsekuensi dari kebijakan tersebut, sehingga berdampak terhadap sekolah yang didirikannya, yaitu Taman Siswa. Atas konsekuensi itu, Ki Hadjar Dewantara beradaptasi dengan cara mengatur siasat yang berasal dari pemikirannya tentang pertanian, kemudian diimplementasikan ke lembaga-lembaga partisipasi yang diperjuangkan oleh beliau, seperti implementasi pertanian terhadap Taman Siswa, serta implementasi pertanian terhadap *Chuo Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat). Implementasi yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara ini, dilaksanakannya dengan membuka sekolah Taman Tani di Taman Siswa, serta memberikan aspirasi dalam sebuah rapat dan sidang di *Chuo Sangi-In*.

Implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang, telah memberikan dampak seperti bentuk implementasi pemikirannya terhadap Taman Siswa yang melakukan pembukaan sekolah Taman Tani yang bersifat kejuruan, tetapi pelaksanaannya tetap menjalani sekolah menengah umum (yang dilarang oleh Jepang) seperti biasa. Selain itu, implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara juga ditujukan terhadap partisipasi politiknya di *Chuo Sangi-In*, dengan menyuarakan aspirasi untuk kesejahteraan rakyat, seperti aspirasi untuk mengapresiasi (penghargaan) kepada profesi pertanian (petani) yang juga mempunyai pengaruh pada pelaksanaan atas kebijakan pemerintah Jepang di bidang pertanian, serta menyuarakan kepentingan pengajaran dan pendidikan nasional yang berusaha untuk mendesak pemerintah Jepang agar menghapus aturan tentang pelarangan sekolah menengah umum bagi sekolah partikelir. Meskipun demikian, partisipasi beliau dalam dewan tersebut nyatanya tidak ada efek perubahan terhadap keputusan pemerintah Jepang di dewan tersebut, sehingga partisipasinya hanya menjadi upaya beliau bersama tokoh-tokoh nasional lainnya untuk memperkuat gerakan kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu, Implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang pemikirannya dinilai berhasil, sebagaimana implementasi tersebut dijadikan beliau sebagai alat untuk berkompromi dan mengelabui pemerintah Jepang. Langkah tersebut dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara, demi menghindari segala bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya dan masyarakat luas, khususnya untuk warga sekolah di Taman Siswa. Layaknya seperti “Ilmu Padi”, yang berfilosofi semakin berisi semakin merunduk, kematangan atas keputusan Ki Hadjar Dewantara telah mempengaruhi jalan perjuangannya untuk lebih taktis dan kooperatif terhadap pemerintah Jepang. Bukan berarti dirinya takut dan menyerah, namun lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan bahaya lain yang ditimbulkan. Setelah Indonesia merdeka, perhatian Ki Hadjar Dewantara mengenai pertanian masih dikumandangkan, sehingga membawa beliau ke pengalaman berikutnya. Pada tahun 1947, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi dosen di Akademi Pertanian Yogyakarta, anggota Dewan Kurator Akademi Pertanian dan Kehutanan Republik Indonesia (Akperhut RI), serta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA RI).

**Saran**

Implementasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pertanian pada masa pendudukan Jepang merupakan kontribusi dan perhatian beliau terhadap esensi kompetensi dan apresiasi untuk aktivitas pertanian. Selain itu, implementasi pemikiran tersebut juga mengandung nilai nasionalisme atas jalan perjuangannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Terlepas dari implementasi pemikirannya, pemerintah, bangsa dan negara Indonesia, khususnya kita seharusnya mengapresiasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan proses dan hasil dari aktivitas pertanian. Bentuk dari apresiasi itu dapat dilakukan dengan cara peduli untuk mengembangkan ilmu pertanian dan mengaplikasikannya kepada masyarakat, tidak mendiskriminasi profesi pertanian, serta membeli produk-produk pertanian (beras, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, dan daging) dalam negeri dari petani lokal.

Dalam salah satu tulisan di majalah pada masa kemerdekaan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara memberikan pandangan bahwa memperhatikan usaha pertanian berarti menjaga garis pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dari pandangan itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, tidaklah boleh diabaikan. Supaya tidak menjadi masalah di negeri sendiri, hal tersebut dilakukan dengan cara menjadikan pertanian sebagai benteng yang kuat dan kokoh dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok kita sendiri, demi mewujudkan ketahanan pangan secara jangka panjang dan kemajuan bagi pertanian nasional.

**Biodata Penulis**

Alamsyah, atau biasa dipanggil Alam, adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, angkatan 2015. Lingkup minat penulisan dari pria berdarah Minang ini, berfokus pada sejarah pemikiran dan kajian budaya (*Cultural Studies*), khususnya terhadap kajian budaya populer (*Pop Culture*). Dalam masa perkuliahannya, Alamsyah aktif mengikuti beberapa organisasi internal kampus, sebagai; Kepala Departemen Keilmuan dan Kajian Budaya BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FIB UI 2017; yang pernah terlibat dalam proyek penelitian Ekspedisi Budaya FIB UI di Cisungsang, Lebak, Banten (2017) dan mengadakan forum diskusi Cangkir Putih FIB UI (2016-2017), serta sebagai Kepala Divisi Kajian Musik Senar Budaya FIB UI 2018. Alamsyah juga aktif mengirimkan artikel tulisan di situs daring *Kompasiana*, dengan fokus pada pembahasan diskursus tentang budaya populer, komunikasi politik, musik, dan sejarah.

**Daftar Referensi**

**Berita Pemerintah dan Majalah:**

*Djawa Baroe*, Jilid I – V, 1942 – 1945

*Kan Po* (Berita Pemerintah), Volume I – IV, 1942 – 1945

*Keloearga*, Jilid I, 1936

*Pantja Raja*, Tahun I, 1945

*Poesara*, Jilid I-XI, 1931 – 1941

*Wasita*, Tahun III-IX, 1930 – 1936

**Naskah Notula:**

Notula Sidang *Sanyo Kaigi*. *Sidang Sanyo Kaigi ke-ampat: Pokok Pembitjaraan; pendjoealan padi dan harga barang*. Pada tanggal 8, boelan 1, tahoen 2605 (1945). Koleksi Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta.

**Buku:**

----------. (1994). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Kedua: Kebudayaan (Cetakan kedua)*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

----------. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan (Cetakan kedua).* Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewantara, Bambang Sokawati. (1989). *Ki Hadjar Dewantara: Ayahku*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dewantara, Bambang Sokawati. (1984). *Nyi Hadjar Dewantara: Dalam Kisah dan Data*. Jakarta: Gunung Agung.

Dewantara, Ki Hadjar. (1952). *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: N.V. Penerbit & Pustaka Endang.

Hadiwijoyo, Ki Soenarno. (2006). *Perguruan Tamansiswa Dalam Perspektif Perjuangan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Hadi Soewito, Irna. (1985). *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kurasawa, Aiko. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.

Nagazumi, Akira. (1988). *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Poeze, Harry A. (2008). *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Penerbit KPG.

Prasedyawati Herkusumo, Arniati. (1986). *Chuo Sangi-In: Dewan Pertimbangan Pusat pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: P.T. Rosda Jayaputra.

Siahaan, Bisuk. (1996). *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI.

Soeratman, Darsiti. (1981). *Ki Hadjar Dewantara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tauchid, Mochammad. (1963). *Perdjuangan dan Adjaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

Tim Penulis Kemdikbud (ed.). (2017). *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tim Penulis Tamansiswa. (1981). *Tamansiswa 30 Tahun (1922-1952); Cetakan ketiga*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Tim Studi Taman Siswa. (1974). *Studi Taman Siswa; Jilid I*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru.